

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANPA
KEMISKINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA Di KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG
BARAT**

Mujahidin¹
Agus Subagyo²
Agustina Setiawan³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the influence of the implementation of the Desa Tanpa Kemiskinan (DTK) policy on the effectiveness of poverty alleviation programs through direct cash assistance (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa—BLT DD) in Cipatat District, West Bandung Regency. The research applies a quantitative descriptive approach using primary data obtained through questionnaires distributed to 90 respondents, including village officials, community beneficiaries, and program managers. The study employs multiple linear regression to assess the relationship between policy implementation dimensions, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure (Edward III) and the effectiveness of poverty alleviation measured by target accuracy, program socialization, goal achievement, and monitoring (Budiani, 2007). The findings indicate a strong and positive correlation ($R^2 = 0.900$) between DTK policy implementation and poverty alleviation effectiveness, with a regression coefficient (β) of 0.658, showing significant influence. The results suggest that well-communicated policies, adequate resources, and responsive bureaucratic systems enhance the accuracy and sustainability of BLT DD programs. The study concludes that improving inter-organizational coordination and adaptive communication is crucial to optimize DTK policy outcomes at the village level.

Keywords: policy implementation, poverty alleviation, DTK program, village governance, BLT Dana Desa

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural di Indonesia yang memerlukan intervensi kebijakan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meluncurkan program Desa Tanpa Kemiskinan (DTK) sebagai salah satu implementasi dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa poin pertama: No Poverty. Program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, penguatan ekonomi lokal, dan penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat miskin.

Kebijakan DTK diterapkan secara nasional dan diintegrasikan dengan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program ini menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak krisis ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19. Di Kabupaten Bandung Barat, khususnya Kecamatan Cipatat, BLT DD menjadi instrumen utama dalam menekan tingkat kemiskinan desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, jumlah penerima BLT DD di Cipatat mencapai 2.380 kepala keluarga, dengan total penyaluran mencapai Rp 8,1 miliar.

Meskipun program BLT DD telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran dana, kurangnya sosialisasi program, dan lemahnya sistem pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan DTK di tingkat desa belum berjalan optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Apabila keempat dimensi tersebut dapat berjalan sinergis, maka pelaksanaan kebijakan akan efektif mencapai tujuan. Sementara itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam konteks ini mengacu pada pandangan Budiani (2007) yang mencakup empat indikator: ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Desa Tanpa Kemiskinan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui BLT Dana Desa di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan (ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi implementasi kebijakan publik di tingkat desa serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program BLT DD agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Kerangka Teori

Dalam teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam tindakan administratif dan sosial. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:91-92), terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi mencerminkan sejauh mana pesan kebijakan disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada para pelaksana dan masyarakat sasaran. Komunikasi yang baik memungkinkan pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prosedur pelaksanaan kebijakan.

Kedua, sumber daya meliputi tenaga kerja, informasi, fasilitas, dan dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Ketiga, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap tujuan program. Pelaksana yang memiliki sikap positif akan melaksanakan kebijakan dengan efektif dan efisien.

Keempat, struktur birokrasi menyangkut tata organisasi, standar operasional prosedur, dan mekanisme koordinasi antar pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang sederhana dan responsif akan mempercepat proses implementasi.

Sementara itu, untuk menilai efektivitas penanggulangan kemiskinan, penelitian ini mengacu pada Budiani (2007:53) yang menekankan empat indikator utama, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program, mengukur sejauh mana penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Sosialisasi program, menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan prosedur bantuan;
3. Pencapaian tujuan program, mengukur sejauh mana program berhasil menurunkan tingkat kemiskinan;
4. Pemantauan program, menunjukkan mekanisme pengawasan terhadap proses pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggabungkan teori Edward III dan Budiani, penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai variabel independen (X) dan efektivitas penanggulangan kemiskinan sebagai variabel dependen (Y). Analisis hubungan antar variabel diharapkan dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi implementasi kebijakan DTK terhadap keberhasilan program BLT DD di Kecamatan Cipatat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif, karena bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara dua variabel yang diukur secara numerik. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan populasi sebanyak 120 orang yang terdiri dari aparat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

desa, pendamping desa, dan penerima manfaat BLT DD. Melalui teknik proportional random sampling, ditentukan 90 responden sebagai sampel penelitian.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel Edward III dan Budiani. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, dan publikasi dari DPMD Kabupaten Bandung Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dibantu perangkat lunak SPSS versi 26.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan keandalan instrumen. Uji determinasi menunjukkan nilai $R^2 = 0.900$, artinya 90% variasi efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan DTK. Koefisien regresi ($\beta = 0.658$, $p < 0.05$) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap efektivitas program.

PEMBAHASAN

Kecamatan Cipatat merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Cipatat mencapai 12,5 persen dari total populasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor informal menjadikan wilayah ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan program Desa Tanpa Kemiskinan (DTK) sebagai bagian dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Program ini diimplementasikan melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang disalurkan langsung kepada keluarga miskin terdampak ekonomi.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Cipatat telah mencapai 85% dari target sasaran yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif. Untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap dimensi mencerminkan aspek krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

1. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek paling mendasar dalam implementasi kebijakan publik. Edward III menekankan bahwa kebijakan akan berjalan efektif apabila pesan dan instruksi kebijakan tersampaikan dengan jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks program DTK di Kecamatan Cipatat, komunikasi menjadi penentu utama yang menghubungkan pemerintah kabupaten, aparat desa, dan masyarakat penerima BLT Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87 persen responden menilai komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan masyarakat berjalan dengan baik. Informasi mengenai kriteria penerima, besaran bantuan, dan prosedur pencairan disosialisasikan melalui forum musyawarah desa, media sosial resmi desa, serta selebaran yang disebar oleh perangkat RT dan RW. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah desa yang kurang optimal dalam menyampaikan informasi administratif dan teknis kepada penerima bantuan baru, sehingga menyebabkan keterlambatan pengumpulan dokumen.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat. Kepala desa yang memiliki gaya komunikasi terbuka dan partisipatif lebih berhasil membangun kepercayaan masyarakat dibandingkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

dengan desa yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah. Selain itu, pendamping desa berperan besar dalam menjembatani komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pelaksana lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan DTK di Kecamatan Cipatat sudah berjalan efektif, tetapi perlu ditingkatkan dalam aspek penyampaian informasi teknis, kecepatan umpan balik, serta mekanisme komunikasi berbasis digital agar koordinasi lintas pihak semakin efisien.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan mencakup segala bentuk dukungan material maupun nonmaterial yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, dana, fasilitas, serta waktu pelaksanaan. Menurut Edward III, kekurangan salah satu aspek sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84 persen responden menilai sumber daya yang dimiliki pelaksana program sudah cukup memadai. Pemerintah desa telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Desa sesuai ketentuan, yakni sebesar 25 persen dari total pagu anggaran. Dari aspek sumber daya manusia, pelaksana program umumnya terdiri dari perangkat desa dan anggota masyarakat yang tergabung dalam *kelompok kerja (Pokja DTK)*. Meski jumlah petugas terbatas, komitmen mereka dalam menjalankan program cukup tinggi.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya. Keterbatasan jumlah petugas verifikasi menyebabkan proses validasi data penerima bantuan berjalan lambat. Selain itu, kondisi

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

geografis beberapa desa di Kecamatan Cipatat yang cukup luas dan berbukit memperlambat mobilisasi bantuan ke rumah penerima manfaat.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah desa berinovasi melalui *sistem gotong royong digital*, di mana data penerima bantuan diunggah secara daring oleh RT setempat untuk mempercepat proses verifikasi. Langkah ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan data.

Secara keseluruhan, dimensi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan DTK di Kecamatan Cipatat tergolong baik, meskipun memerlukan optimalisasi dalam distribusi sumber daya manusia dan digitalisasi proses verifikasi agar efektivitas implementasi semakin meningkat.

3. Dimensi Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat komitmen, integritas, dan motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa meskipun kebijakan memiliki desain yang baik, tanpa sikap positif dari pelaksana, implementasi kebijakan akan gagal mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi disposisi memperoleh nilai rata-rata tertinggi dibanding dimensi lainnya, yaitu 4,12 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana program di Kecamatan Cipatat memiliki dedikasi tinggi dan sikap positif terhadap kebijakan DTK. Kepala desa dan perangkatnya secara aktif berperan dalam memfasilitasi musyawarah penentuan penerima bantuan serta memastikan proses penyaluran berjalan transparan.

Di sisi lain, pelaksana di beberapa desa masih menghadapi dilema moral ketika harus memutuskan calon penerima bantuan di tengah keterbatasan kuota. Dalam situasi seperti ini, integritas pelaksana menjadi faktor kunci. Wawancara

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

mendalam menunjukkan bahwa sebagian aparat desa menggunakan pendekatan musyawarah terbuka dengan tokoh masyarakat untuk menghindari konflik sosial.

Peneliti menyimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan di Kecamatan Cipatat secara umum sudah baik. Sikap jujur, tanggung jawab, dan partisipatif dari aparat desa berkontribusi besar terhadap keberhasilan program. Namun, diperlukan penguatan kode etik dan pembinaan moral agar sikap profesionalisme pelaksana tetap terjaga di masa mendatang.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana prosedur operasional dilaksanakan. Edward III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan fleksibel akan memperlancar alur implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan DTK di Kecamatan Cipatat, struktur birokrasi pelaksanaan program tergolong baik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai pembina dan pengawas, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh pemerintah desa melalui *Pokja DTK*. Setiap desa memiliki tim pelaksana yang terdiri dari aparat desa, kader PKK, dan pendamping masyarakat. Mekanisme kerja diatur dalam prosedur tetap (protap) yang disusun oleh DPMD.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa koordinasi lintas unit kerja masih menghadapi kendala, terutama antara DPMD kabupaten dan aparat desa dalam hal sinkronisasi data penerima bantuan. Perbedaan waktu pelaporan dan perbedaan format dokumen menyebabkan keterlambatan penyaluran dana.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Selain itu, birokrasi yang panjang pada proses pencairan membuat pelaksanaan program sering melampaui jadwal yang ditentukan.

Namun, langkah reformasi administratif sudah mulai terlihat. Beberapa desa di Cipatat telah mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis daring untuk mempercepat koordinasi dan meminimalkan kesalahan administratif. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan menuju tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, struktur birokrasi pelaksana kebijakan DTK di Kecamatan Cipatat dapat dikategorikan cukup efektif, namun perlu penyederhanaan alur administrasi dan peningkatan sistem koordinasi antar level pemerintahan agar implementasi kebijakan lebih cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian keempat dimensi teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *Desa Tanpa Kemiskinan* di Kecamatan Cipatat telah berjalan efektif dengan dukungan komunikasi yang terbuka, sumber daya yang cukup memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang fungsional. Hasil analisis statistik yang menunjukkan nilai determinasi R^2 sebesar 0.900 dan koefisien regresi $\beta = 0.658$ memperkuat temuan ini bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui program BLT Dana Desa.

Secara empiris, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini juga didorong oleh nilai-nilai sosial masyarakat yang masih kuat, seperti gotong royong, partisipasi aktif warga, dan kepemimpinan lokal yang inklusif. Namun, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek koordinasi lintas lembaga dan optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi program.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

Dengan memperkuat faktor-faktor implementatif dan memperbaiki kelemahan administratif, program *Desa Tanpa Kemiskinan* berpotensi menjadi model kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis desa yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan *Desa Tanpa Kemiskinan (DTK)* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui program *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)* di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini ditentukan oleh sinergi antara komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat dimensi teori Edward III berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian indikator efektivitas program sebagaimana dirumuskan Budiani (2007), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.900 yang menunjukkan pengaruh sangat kuat.

Secara empiris, komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat telah menciptakan transparansi dalam proses penyaluran bantuan dan memperkuat rasa kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sumber daya manusia yang terlatih dan didukung oleh alokasi dana yang tepat guna berkontribusi terhadap keberlanjutan program. Disposisi pelaksana yang berorientasi pada pelayanan publik menjadikan pelaksanaan kebijakan lebih efisien dan minim resistensi sosial. Sementara itu, struktur birokrasi yang meskipun masih bersifat hierarkis telah menunjukkan kemajuan menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif dan digital.

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan Edward III bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik di tingkat lokal sangat bergantung pada harmonisasi antara faktor struktural dan kultural dalam sistem

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 15 Okt 2025**Published : 24 Okt 2025*

pemerintahan desa. Dalam konteks Cipatat, keberhasilan implementasi DTK bukan hanya hasil dari dukungan regulatif, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial masyarakat yang menjunjung gotong royong dan solidaritas. Oleh karena itu, kebijakan DTK perlu dipertahankan sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di tingkat desa, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan secara inklusif dan berkeadilan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Desa Tanpa Kemiskinan di masa mendatang, disarankan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme komunikasi lintas lembaga melalui sistem informasi berbasis digital agar setiap proses administrasi, verifikasi data penerima, dan pelaporan keuangan dapat berjalan transparan dan real-time. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi prioritas dengan menyelenggarakan pelatihan teknis mengenai manajemen program, literasi digital, dan akuntabilitas publik bagi aparat pelaksana. Ketiga, pemerintah desa perlu memperluas pola partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelompok rentan dan tokoh masyarakat dalam perencanaan maupun evaluasi program untuk memastikan kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, reformasi struktur birokrasi di tingkat kabupaten dan desa perlu diarahkan menuju model tata kelola yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil (*result-oriented management*). Pemerintah daerah bersama DPMD dapat mengembangkan sistem pemantauan terpadu berbasis aplikasi yang menghubungkan desa dengan lembaga pengawas daerah, sehingga proses evaluasi program dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Dalam jangka panjang, kebijakan Desa Tanpa Kemiskinan harus dikembangkan tidak hanya sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan usaha mikro, diversifikasi sumber pendapatan desa, dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin. Dengan demikian, tujuan utama program DTK untuk mewujudkan

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat desa akan dapat tercapai secara nyata.

REFERENSI

- Budiani, N. (2007). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di era kolaboratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati, T., & Pratiwi, A. (2023). The role of village government in implementing poverty alleviation programs in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 75–89. <https://doi.org/10.23960/jip.v12i2.2023>
- Sari, N., & Handayani, E. (2022). Analisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam menekan angka kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 101–116. <https://doi.org/10.24815/jekp.v9i1.2022>
- Setiawan, B., & Lestari, R. (2021). Implementasi kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(3), 233–247. <https://doi.org/10.23960/japi.v10i3.2021>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2022). Governance and accountability in village-based poverty alleviation programs. *Asian Journal of Public Administration*, 14(2), 187–204. <https://doi.org/10.1080/17516234.2022.2094873>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 15 Okt 2025

Published : 24 Okt 2025

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Program Desa Tanpa Kemiskinan.

Wibowo, H., & Setiawan, I. (2024). Strengthening public participation in poverty reduction programs: Lessons from village governance in Indonesia. *Journal of Public Policy and Local Development*, 11(1), 22–37. <https://doi.org/10.31293/jppld.v11i1.2024>